



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni
2019

(UNAUDITED)



Jl. WR. Supratman No.01 Km. X Kota Tanjungpinang

Telp: (0771) -4442004, E-mail: bps2172@bps.go.id

Homepage: <http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni
2019

(UNAUDITED)



Jl. WR. Supratman No.01 Km. X Kota Tanjungpinang
Telp: (0771) -4442004, E-mail: bps2172@bps.go.id
Homepage: <http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

LAPORAN KEUANGAN
SATKER BPS KOTA TANJUNGPINANG
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

ISBN : -

Katalog : 1203019.2172

No. publikasi : 21720.1908

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 57 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Dicetak dan Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Index Singkatan	vii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan.....	3
Neraca Perbandingan.....	4
Laporan Operasional Perbandingan.....	6
Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan	7
Penjelasan Umum	8
CaLK	
Laporan Realisasi Anggaran.....	23
Penjelasan Anggaran Belanja.....	23
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	24
Belanja Negara	25
Belanja Pegawai	27
Belanja Barang	28
Belanja Modal	28
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin.....	29
Neraca	
Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	31
Persediaan.....	31
Tanah.....	32
Peralatan Dan Mesin	33
Gedung Dan Bangunan	34
Aset Tetap Lainnya.....	35
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.	36
Aset Tak Berwujud.....	36
Aset Lain-lain	37
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	38
Utang Kepada Pihak Ketiga	39
Uang Muka Dari Kppn.....	40
Ekuitas.....	40
Laporan Operasional	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	41
Beban Pegawai	42

Beban Persediaan	44
Beban Barang dan Jasa.....	44
Beban Pemeliharaan	46
Beban Perjalanan Dinas	47
Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	49
Laporan Perubahan Ekuitas	51
Ekuitas awal	51
Surplus/defisit-LO	51
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	51
Koreksi Atas Reklasifikasi	51
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	52
Transaksi Antar Entitas	52
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	53
Transfer Masuk/Transfer Keluar	53
Ekuitas Akhir.....	54
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	
Pengungkapan Lain Lain.....	55
Lampiran dan Daftar	

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Tanjungpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Tanjungpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 18 Juli 2019
Kepala,

MANGAMPUTUA
NIP.196609261992121001



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGPINANG**

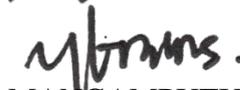
Jl. WR. Supratman No.01 Km. X Kota Tanjungpinang

Telp: (0771) -4442004, E-mail: bps2172@bps.go.idHomepage: <http://tanjungpinangkota.bps.go.id>**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 18 Juli 2019

 Kepala,

MANGAMPUTUA

NIP.196609261992121001

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp596.385 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp2.118.537.985 atau mencapai 55,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.785.285.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.431.625.061 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp33.829.100; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.392.830.841; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.965.120.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp2.401.625.061.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp596.385, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.171.822.480 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.171.226.095. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp13.300 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.171.212.795.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp2.449.113.404 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.171.212.795 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp3.551.672 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.120.172.780 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp2.401.625.061.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Tanjungpinang
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019		% terhadap Anggaran	30 Juni 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	596.385	0,00	599.502
JUMLAH PENDAPATAN		0	596.385	0,00	599.502
Belanja Pegawai	B.3	1.917.804.000	1.291.913.685	67,36	919.084.416
Belanja Barang	B.4	1.867.481.000	826.624.300	44,26	530.211.700
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	359.000.000
JUMLAH BELANJA		3.785.285.000	2.118.537.985	55,97	1.808.296.116

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

BPS Kota Tanjungpinang
NERACA
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	0
Persediaan	C.2	3.829.100	27.244.736
Jumlah Aset Lancar		33.829.100	27.244.736
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	473.634.000	473.634.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.916.125.330	1.921.221.330
Gedung Dan Bangunan	C.5	1.350.060.557	1.350.060.557
Aset Tetap Lainnya	C.6	127.985.524	124.433.852
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.474.974.570)	(1.352.386.397)
Jumlah Aset Tetap		2.392.830.841	2.516.963.342
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	98.282.354	98.282.354
Aset Lain-lain	C.9	144.514.318	139.418.318
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(237.831.552)	(231.350.882)
Jumlah Aset Lainnya		4.965.120	6.349.790
JUMLAH ASET		2.431.625.061	2.550.557.868

KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	0	101.444.464
Uang Muka dari KPPN	C.12	30.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		30.000.000	101.444.464
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	2.401.625.061	2.449.113.404
JUMLAH EKUITAS		2.401.625.061	2.449.113.404
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.431.625.061	2.550.557.868

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Tanjungpinang
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	596.385	599.502
JUMLAH PENDAPATAN		596.385	599.502
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.198.087.992	855.553.620
Beban Persediaan	D.3	42.274.816	47.477.738
Beban Barang dan Jasa	D.4	526.756.529	299.215.214
Beban Pemeliharaan	D.5	52.679.300	80.647.600
Beban Perjalanan Dinas	D.6	222.955.000	121.360.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	129.068.843	138.471.366
JUMLAH BEBAN		2.171.822.480	1.542.725.538
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.171.226.095)	(1.542.126.036)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		300	2.700
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.300	57.400
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.171.212.795)	(1.542.068.636)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT		(2.171.212.795)	(1.542.068.636)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Tanjungpinang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Ekuitas awal	E.1	2.449.113.404	2.258.199.996
Surplus/defisit-LO	E.2	(2.171.212.795)	(1.542.068.636)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	3.551.672	3.555.970
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	3.551.672	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0	3.555.970
Transaksi Antar Entitas	E.4	2.120.172.780	1.829.029.352
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	2.117.941.600	1.807.696.614
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	2.231.180	21.332.738
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(47.488.343)	290.516.686
Ekuitas Akhir	E.5	2.401.625.061	2.548.716.682

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Dasar Hukum A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi

- Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
 30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
 32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
 35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
 36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
 37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
 38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-

- 13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018.
39. Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
40. Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
41. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahun 2018 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir T.A 2018; dan
42. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir T.A 2018.

Entitas dan
Rencana
Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Tanjungpinang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015-2019 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, (*The Agent of Trustworthy Statistical Data for All*)**; Misi BPS:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Program Generik ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA). Program Generik BPS ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi barang, dan kinerja aparatur BPS di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Tanjungpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kota Tanjungpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA (1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan
LO (2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih

rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Tanjungpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4. Rincian Anggaran

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	1.917.804.000	1.917.804.000
BELANJA BARANG	1.748.183.000	1.867.481.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	3.665.987.000	3.785.285.000

Tabel 5. Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.495.210.000	2.495.210.000
BELANJA PEGAWAI	1.917.804.000	1.917.804.000
BELANJA BARANG	577.406.000	577.406.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	0	0

BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.170.777.000	1.290.075.000
BELANJA BARANG	1.170.777.000	1.290.075.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	3.665.987.000	3.785.285.000

Pada Semester I TA 2019, BPS Kota Tanjungpinang mengalami Revisi DIPA sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Adapun revisi DIPA yang terjadi pada Semester I TA 2019 adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke 1 tanggal 2 Mei 2019 dengan nilai pagu Rp. 3.785.285.000
2. Revisi DIPA ke 2 tanggal 31 Mei 2019 dengan nilai pagu Rp. 3.785.285.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp596.385*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp596.385 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0	596.385	0,00
Jumlah	0	596.385	0,00

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2019 dan
30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019(Rp)	Realisasi 30 Juni 2018(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	596.385	599.502	(0,52)
Jumlah	596.385	599.502	(0,52)

Realisasi Pendapatan 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 0,52 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 30 Juni 2018.

Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dibandingkan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 058 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Pada Semester I Tahun 2019, BPS Kota Tanjungpinang memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp. 596.385,- berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas kepala BPS Kota Tanjungpinang selama bulan Januari s.d. Juni 2019.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp2.118.537.985*

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp2.118.537.985 atau 55,97 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.785.285.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	1.917.804.000	1.291.913.685	67,36
BELANJA BARANG	1.867.481.000	826.624.300	44,26
BELANJA MODAL	0	0	0,00
Jumlah Netto	3.785.285.000	2.118.537.985	55,97

Belanja Negara merupakan rekapitulasi dari belanja barang yang nilainya Rp. 826.624.300, belanja modal yang nilainya Rp 0, dan belanja pegawai yang nilainya Rp. 1.291.913.685.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	1.292.653.555	919.797.820	40,54
BELANJA BARANG	826.624.300	530.661.700	55,77
BELANJA MODAL	0	359.000.000	(100,00)
Jumlah Bruto	2.119.277.855	1.809.459.520	17,12
Pengembalian Belanja	739.870	1.163.404	(36,40)
Jumlah	2.118.537.985	1.808.296.116	17,16

Realisasi Belanja 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,16 dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2018.

Hal tersebut dikarenakan penambahan jumlah pegawai, kenaikan gaji dan tunjangan kinerja dibandingkan Tahun 2018, serta adanya kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah kerja Statistik Tahun 2019 yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Belanja Pegawai
Rp1.291.913.685

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.291.913.685 dan Rp919.084.416. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	624.115.101	493.150.724	26,56
Belanja Lembur	11.935.000	13.183.000	(9,47)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	656.603.454	413.464.096	58,81
Jumlah Bruto	1.292.653.555	919.797.820	40,54
Pengembalian Belanja	739.870	713.404	3,71
Jumlah	1.291.913.685	919.084.416	40,57

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 40,57 persen dari 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang;
2. Adanya pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14;
3. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Kinerja ke-13; dan
4. Adanya kenaikan nilai Tunjangan Kinerja Pegawai dibandingkan Januari – Juni 2018.

Belanja Barang
Rp826.624.300

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp826.624.300 dan Rp530.211.700.

Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	138.247.600	125.821.800	9,88
Belanja Barang Non Operasional	377.991.000	161.873.200	133,51
Belanja Barang Persediaan	20.471.000	26.034.000	(21,37)
Belanja Jasa	18.136.700	19.295.700	(6,01)
Belanja Pemeliharaan	48.823.000	75.827.000	(35,61)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	222.955.000	121.810.000	83,04
Jumlah Bruto	826.624.300	530.661.700	55,77
Pengembalian Belanja	0	450.000	(100,00)
Jumlah	826.624.300	530.211.700	55,90

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 55,90 dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2018.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik 2019 untuk persiapan kegiatan SP2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp452.454.000 dan jumlah realisasi anggaran per 30 Juni 2019 sebesar Rp303.763.000.

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp359.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	359.000.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	359.000.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	359.000.000	(100,00)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 30 Juni 2019 sebesar 100,00 persen dibandingkan 30 Juni 2018 disebabkan oleh tidak adanya belanja modal di Tahun Anggaran 2019.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp359.000.000.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2019 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	359.000.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	359.000.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	359.000.000	(100,00)

Realisasi tersebut pada 30 Juni 2019, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2018 sebesar Rp359.000.000.

Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja modal untuk Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2019.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018

Uraian	30 Juni 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Uang Tunai di Brankas	10.357.800	0
Uang di Rekening Bendahara	0	0
Kuitansi UP yang belum di SP2D-kan	19.642.200	0
Jumlah	30.000.000	0

*Persediaan
Rp3.829.100*

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.829.100 dan Rp27.244.736. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan Sampai 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	30 Juni 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Barang Konsumsi	3.124.900	26.013.136
Bahan untuk Pemeliharaan	704.200	1.231.600
Jumlah	3.829.100	27.244.736

Mutasi Nilai Persediaan 30 Juni 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	27.244.736
Mutasi Tambah :	
Pembelian	20.903.000
Transfer Masuk	2.231.180
Koreksi Penyesuaian Persediaan	13.300
Total Mutasi Tambah :	23.147.480
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	46.563.116
Total Mutasi Kurang :	46.563.116
Kenaikan(Penurunan)	-23.415.636
Saldo Nilai Perolehan Per 30 Juni 2019	3.829.100

Barang persediaan seluruhnya berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp473.634.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp473.634.000 dan Rp473.634.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	473.634.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2019	473.634.000

Rincian nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan Gedung Kantor seluas 1.050 m² yang terletak di Jalan W.R. Supratman No. 1 Km. X Tanjungpinang bernilai Rp386.859.000 dan sudah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan SK PSP No. KEP.12/KM.6/WKN.03/KNL.04/2014 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32.05.03.03.4.00009 yang sudah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tanggal 21 September 2012.

2. Tanah rumah dinas Kepala BPS Kota Tanjungpinang seluas 260 m² yang terletak di Jalan Hang Lekir Kp. Sidodadi Km. X Tanjungpinang bernilai Rp86.775.000 dan sudah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan SK PSP No. KEP.12/KM.6/WKN.03/KNL.04/2014 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32.05.03.04.4.00033 yang sudah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tanggal 18 September 2012.

Peralatan dan Mesin
Rp1.916.125.330

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.916.125.330 dan Rp1.921.221.330. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan	1.921.221.330
Per 31 Desember 2018	
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(5.096.000)
Total Mutasi Kurang :	(5.096.000)
Kenaikan(Penurunan)	(5.096.000)
Saldo Nilai Perolehan	1.916.125.330
30 Juni 2019	

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019	(1.390.479.098)
Nilai Buku sampai dengan 30 Juni 2019	525.646.232

Transaksi mutasi kurang pada BPS Kota Tanjungpinang sebesar Rp5.096.000 yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa penghentian penggunaan AC Split NUP. 03 (1 buah) dan kursi besi metal NUP. 90 (1 buah) yang dibuktikan dengan SK No. 001/BAP-BMN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Kondisi BMN.

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.350.060.557*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.350.060.557 dan Rp1.350.060.557. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	1.350.060.557
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2019	1.350.060.557
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019	(84.495.472)
Nilai Buku sampai dengan 30 Juni 2019	1.265.565.085

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada nilai gedung dan bangunan BPS Kota Tanjungpinang per tanggal 30 Juni 2019.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 1 unit Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp810.100.884;
2. 1 unit Rumah Negara Gol. 1 (Rudin) sebesar Rp198.123.808; dan
3. 1 unit Tugu/Tanda Batas (Pagar Rudin) sebesar Rp257.340.393.

Aset Tetap Lainnya
Rp127.985.524

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp127.985.524 dan Rp124.433.852. Nilai mutasi atas aset tetap per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	124.433.852
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Masuk	3.551.672
Total Mutasi Tambah :	3.551.672
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	3.551.672
Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2019	127.985.524
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019	0
Nilai Buku sampai dengan 30 Juni 2019	127.985.524

Mutasi tambah berupa Reklasifikasi Masuk senilai Rp3.551.672 berasal dari serial lainnya (Buku)/ Publikasi.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.474.974.570*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp1.474.974.570 dan Rp1.352.386.397. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.916.125.330	1.390.479.098	525.646.232
Gedung dan Bangunan	1.350.060.557	84.495.472	1.265.565.085
Aset Tetap Lainnya	127.985.524	0	127.985.524
Jumlah	3.394.171.411	1.474.974.570	1.919.196.841

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi penyusutan terbentuk dari aplikasi secara sistem yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

*Aset Tak Berwujud
Rp98.282.354*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp98.282.354 dan Rp98.282.354. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software

yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Aset Tak berwujud 30 Juni 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Software	98.282.354
Jumlah	98.282.354

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	98.282.354
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 30 Juni 2019	98.282.354
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019	(94.344.854)
Nilai Buku sampai dengan 30 Juni 2019	3.937.500

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Tak Berwujud di BPS Kota Tanjungpinang per tanggal 30 Juni 2019. Aset Tak Berwujud terbentuk dari aplikasi secara sistem, yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

Aset Lain-lain
Rp144.514.318

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp144.514.318 dan Rp139.418.318. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat

dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018		139.418.318
Mutasi Tambah :		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.096.000	
Total Mutasi Tambah :	5.096.000	
Mutasi Kurang :		
Total Mutasi Kurang :	0	
Kenaikan(Penurunan)		5.096.000
Saldo Nilai Perolehan Per 30 Juni 2019		144.514.318
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019		(143.486.698)
Nilai Buku sampai dengan 30 Juni 2019		1.027.620

Aset lain-lain juga terbentuk dari aplikasi secara sistem, yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp237.831.552*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp237.831.552 dan Rp231.350.882. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	98.282.354	94.344.854	3.937.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	144.514.318	143.486.698	1.027.620
Jumlah	242.796.672	237.831.552	4.965.120

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Akumulasi penyusutan terbentuk dari aplikasi secara sistem, yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp101.444.464. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Tanjungpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2019 dan 2018

Jenis	30 Juni 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	93.825.693
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	7.618.771
Jumlah	0	101.444.464

Utang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2018 yaitu belanja barang berupa pembayaran tagihan listrik dan internet bulan Desember 2018, serta belanja pegawai berupa tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember 2018.

Utang kepada Pihak Ketiga yang masih harus dibayar BPS Kota Tanjungpinang per tanggal 30 Juni 2019 bernilai Rp.0,- dikarenakan semua belanja barang maupun pegawai sudah dibayarkan pada bulan Januari 2019.

Uang Muka dari KPPN Rp30.000.000 **C.12 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari kas di bendahara pengeluaran yang ada di kelompok akun aset lancar.

Ekuitas Rp2.401.625.061 **C.13 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.401.625.061 dan Rp2.449.113.404. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNB
Rp596.385

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp596.385 dan Rp599.502. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	596.385	599.502	(0,52)
Jumlah	596.385	599.502	(0,52)

Tabel 21. Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 30 Juni 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	596.385	596.385	0
Jumlah	596.385	596.385	0

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp. 596.385,- berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas kepala BPS Kota Tanjungpinang selama bulan Januari s.d. Juni 2019.

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 0,52 persen dibandingkan tanggal 30 Juni 2018. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018.

Beban Pegawai
Rp1.198.087.992

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.198.087.992 dan Rp855.553.620. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 22. Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	459.618.300	355.480.300	29,30
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.623	5.888	(4,50)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	22.797.720	17.963.240	26,91
Beban Tunj. Anak PNS	7.826.468	6.361.856	23,02
Beban Tunj. Struktural PNS	31.500.000	31.500.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.780.000	3.780.000	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	657.610	287.100	129,05
Beban Tunj. Beras PNS	19.770.660	16.439.340	20,26
Beban Uang Makan PNS	54.073.300	42.355.800	27,66
Beban Tunjangan Umum PNS	15.275.000	10.590.000	44,24
Beban Uang Lembur	11.935.000	13.183.000	(9,47)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	570.848.311	357.607.096	59,63
Jumlah	1.198.087.992	855.553.620	40,04

Beban Pegawai per tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar 40,04 persen disebabkan karena adanya kenaikan besaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai, penambahan jumlah pegawai, pembayaran gaji ke-13 dan 14, dan pembayaran tunjangan ke-13 dan 14.

Tabel 23. Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 30 Juni 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	459.618.300	459.618.300	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.623	5.623	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	22.797.720	22.797.720	0
Beban Tunj. Anak PNS	7.826.468	7.826.468	0
Beban Tunj. Struktural PNS	31.500.000	31.500.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.780.000	3.780.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	657.610	657.610	0
Beban Tunj. Beras PNS	19.770.660	19.770.660	0
Beban Uang Makan PNS	54.073.300	62.143.850	(8.070.550)
Beban Tunjangan Umum PNS	15.275.000	15.275.000	0
Beban Uang Lembur	11.935.000	11.935.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	570.848.311	656.603.454	(85.755.143)
Jumlah	1.198.087.992	1.291.913.685	(93.825.693)

Selisih nilai beban pegawai pada LO dan LRA per tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp93.825.693 yang terdiri dari :

1. Selisih Beban Uang Makan PNS, yang berasal dari jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2019 atas pelunasan kekurangan uang makan pegawai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 8.070.550,-

2. Selisih Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan), yang berasal dari jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2019 atas pelunasan kekurangan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 85.755.143,-

Beban Persediaan **D.3 Beban Persediaan**
Rp42.274.816

Jumlah Beban Persediaan sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.274.816 dan Rp47.477.738. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	42.274.816	47.477.738	(10,96)
Jumlah	42.274.816	47.477.738	(10,96)

Kebijakan akuntansi pemerintah pusat berbasis akrual menetapkan sistem pencatatan persediaan dengan metode harga barang perolehan terakhir sehingga pada akhir bulan pencatatan memungkinkan terjadinya selisih nilai.

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**
Rp526.756.529

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp526.756.529 dan Rp299.215.214. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 30 Juni 2019 dan
30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	95.323.600	78.359.940	21,65
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	2.880.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44.000	79.500	(44,65)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38.150.000	39.510.000	(3,44)
Beban Bahan	68.887.000	30.479.200	126,01
Beban Honor Output Kegiatan	307.179.000	131.394.000	133,78
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.925.000	0	0,00
Beban Langganan Listrik	15.038.029	13.327.374	12,84
Beban Langganan Telepon	209.900	685.200	(69,37)
Beban Jasa Profesi	0	2.500.000	(100,00)
Jumlah	526.756.529	299.215.214	76,05

Tabel 26. Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa
Sampai 30 Juni 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	95.323.600	100.053.600	(4.730.000)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44.000	44.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38.150.000	38.150.000	0
Beban Bahan	68.887.000	68.887.000	0

Beban Honor Output Kegiatan	307.179.000	307.179.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.925.000	1.925.000	0
Beban Langganan Listrik	15.038.029	17.926.800	(2.888.771)
Beban Langganan Telepon	209.900	209.900	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Jumlah	526.756.529	534.375.300	(7.618.771)

Selisih nilai beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp7.618.771 yang terdiri dari :

1. Selisih Beban Keperluan Perkantoran (Tagihan Internet Kantor), yang berasal dari jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2019 atas pelunasan keperluan perkantoran bulan Desember 2018 sebesar Rp4.730.000,-
2. Selisih Beban Langganan Listrik, yang berasal dari jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2019 atas pelunasan Langganan Listrik bulan Desember 2018 sebesar Rp2.888.771,-

*Beban
Pemeliharaan
Rp52.679.300*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp52.679.300 dan Rp80.647.600. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 27. Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.177.400	41.241.000	(68,05)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.213.600	34.154.000	3,10
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.288.300	5.252.600	(18,36)
Jumlah	52.679.300	80.647.600	(34,68)

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 34,68 persen dibandingkan 30 Juni 2018 dikarenakan nilai perbaikan bangunan gedung kantor dan rumah dinas lebih besar di Tahun 2018.

Tabel 28. Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 30 Juni 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.177.400	13.177.400	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.213.600	35.213.600	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.288.300	0	4.288.300
Jumlah	52.679.300	48.391.000	4.288.300

Beban pemeliharaan senilai Rp4.288.300 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban Perjalanan Dinas
Rp222.955.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp222.955.000 dan Rp121.360.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 29. Rincian Perjalanan Dinas sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	2.080.000	840.000	147,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.150.000	53.650.000	12,12
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.725.000	66.870.000	140,35
Jumlah	222.955.000	121.360.000	83,71

Beban Perjalanan Dinas per tanggal 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 83,71 persen dibandingkan Beban Perjalanan Dinas per tanggal 30 Juni 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik 2019 untuk persiapan kegiatan SP2020 yang memerlukan anggaran yang cukup besar.

Tabel 30. Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 30 Juni 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	2.080.000	2.080.000	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.150.000	60.150.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.725.000	160.725.000	0
Jumlah	222.955.000	222.955.000	0

Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA tidak memiliki selisih per tanggal 30 Juni 2019.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp129.068.843*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp129.068.843 dan Rp138.471.366. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 31. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.690.812	123.535.146	(8,78)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.694.161	14.936.220	(1,62)
Beban Amortisasi Software	656.250	0	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.027.620	0	0,00
Jumlah	129.068.843	138.471.366	(6,79)

Akumulasi penyusutan terbentuk dari aplikasi secara sistem yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp13.300*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	13.600	60.100	(77,37)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	300	2.700	(88,89)
Jumlah	13.300	57.400	(76,83)

Kegiatan Non Operasional di LO pada 30 Juni 2019 dibandingkan 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 76,83 persen. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp13.600,-. Sedangkan beban dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp300,- berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan yang merupakan akibat dari kebijakan akuntansi persediaan yang menerapkan nilai perolehan terakhir.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.449.113.404

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.449.113.404 dan Rp2.258.199.996.

Defisit LO
Rp2.171.212.795

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.171.212.795 dan Rp1.542.068.636. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.551.672 dan Rp3.555.970. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	30 Juni 2019 (Rp)	30 Juni 2018 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	3.551.672	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3.555.970
Jumlah	3.551.672	3.555.970

Nilai koreksi BPS Kota Tanjungpinang per 30 Juni 2019 terdiri dari Koreksi atas Reklasifikasi sebesar Rp3.551.672.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp3.551.672

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.551.672 dan Rp0.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk BPS Kota Tanjungpinang terdiri dari reklasifikasi masuk berupa buku dan publikasi statistik.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp3.555.970. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 34. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi (Rp)
Jumlah	0

Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi oleh BPS Kota Tanjungpinang per 30 Juni 2019.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp2.120.172.780*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.120.172.780 dan Rp1.829.029.352. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 35. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	30 Juni 2019 (Rp)	30 Juni 2018 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.118.537.985	1.808.296.116
Diterima dari Entitas Lain	(596.385)	(599.502)
Transfer Masuk	2.231.180	21.332.738
Jumlah	2.120.172.780	1.829.029.352

Transaksi antar entitas pada 30 Juni 2019 sebesar Rp2.120.172.780,- berasal dari yang Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) yang merupakan belanja negara sebesar Rp2.118.537.985,- ditambah transfer masuk sebesar Rp2.231.180,- dan dikurangi yang Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp596.385,-.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar minus Rp596.385 sedangkan DKEL sebesar Rp2.118.537.985. Transaksi DDEL/DKEL terbentuk dari aplikasi secara sistem, yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp2.231.180. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0.

Tabel 36. Rincian Transfer Masuk Per 30 Juni 2019

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Kepulauan Riau	Barang Konsumsi	2.231.180	0	2.231.180
Jumlah		2.231.180	0	2.231.180

Transfer masuk yang diterima BPS Kota Tanjungpinang per 30 Juni 2019 berasal dari BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.231.180 berupa Buku/Publikasi. Transfer Masuk/Transfer Keluar terbentuk dari aplikasi secara sistem, yang diterima aplikasi SAIBA dari kiriman SIMAK-BMN.

Ekuitas Akhir
Rp2.401.625.061

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.401.625.061 dan Rp2.548.716.682.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA****KEPALA KANTOR BPS KOTA TANJUNGPINANG**

Pengungkapan lain-lain pada Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan mengenai Kepala Kantor atau yang memimpin Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 040/KPG Tahun 2016 terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016 adalah Bapak Mangamputua yang ditetapkan sebagai Kepala Kantor sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kota Tanjungpinang.

REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0191325043 atas nama Bendahara Pengeluaran (BPg) BPS Kota Tanjungpinang.

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan BPS Kota Tanjungpinang untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 disusun berdasarkan dari laporan SAIBA yang sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN Tanjungpinang sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-56454/WPB.31/KP.009/2019 Tanggal 09 Juli 2019.

REVISI DIPA

DIPA Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Nomor : SP DIPA-054.01.2.652186/2019 mempunyai nilai pagu awal sebesar Rp3.665.987.000. Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 telah dilakukan Revisi DIPA sebanyak dua kali, yang mengakibatkan perubahan nilai pagu, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Pertama – Revisi DJA

Revisi DIPA Pertama Tanggal 2 Mei 2019 terdapat penambahan nilai pagu menjadi Rp3.785.285.000,00 disebabkan adanya pelimpahan anggaran dari BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp119.298.000 untuk Kegiatan Bidang Statistik Distribusi dan Neraca.

2. Revisi DIPA Kedua – Revisi DJPb

Revisi DIPA Kedua pada Tanggal 31 Mei 2019 tidak ada perubahan nilai pagu. Terdapat pergeseran rincian anggaran antar akun dan komponen dalam satu output. Alasan atau pertimbangan perlunya revisi anggaran antara lain adanya antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kualitas belanja.

Formulir Penyesuaian untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019

Jurnal Penyesuaian untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang diantaranya :

1. Jurnal Balik Atas Beban Langganan Listrik :

D : 521111 (Beban Langganan Listrik) Rp2.888.771
K : 212112 (Belanja Barang YMHD) Rp2.888.771

2. Jurnal Balik Atas Beban Langganan Internet :

D : 521111 (Beban Langganan Internet) Rp4.730.000
K : 212112 (Belanja Barang YMHD) Rp4.730.000

3. Jurnal Balik Atas Beban Uang Makan PNS :

D : 511129 (Beban Uang Makan PNS) Rp8.070.550
K : 212111 (Belanja Barang YMHD) Rp8.070.550

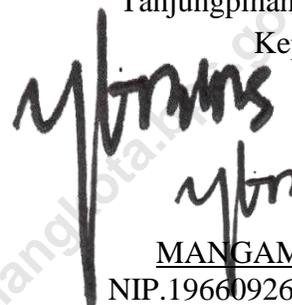
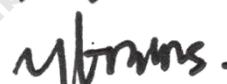
4. Jurnal Balik Atas Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan):

D : 512411 (Beban Pegawai berupa Tunjangan Khusus/
Kegiatan) Rp85.755.143

K : 212111 (Belanja Barang YMHD) Rp85.755.143

Tanjungpinang, 18 Juli 2019

Kepala,

MANGAMPUTUA

NIP.196609261992121001